



## Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Barat

Muwaffiq Nurimansyah Mapparenta<sup>1</sup>, Yuyu Chandra Pratiwi<sup>2</sup>, Novita Kumala Sari<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muslim Indonesia, Makassar

<sup>2</sup> Universitas Wira Bhakti, Makassar

<sup>3</sup> Universitas Fajar, Makassar

### Abstract

*This study aims to analyze the effect of the obligation to own a Taxpayer Identification Number (NPWP) and tax collection on tax revenue at the West Makassar Pratama Tax Office (KPP Pratama). This study uses a quantitative approach with a survey method. Research data were obtained by distributing questionnaires to taxpayers registered at the West Makassar Pratama KPP with a sample of 100 respondents. Data analysis was conducted using multiple linear regression analysis preceded by validity and reliability tests, as well as classical assumption tests. The results show that the obligation to own a Taxpayer Identification Number (NPWP) affects tax revenue. In addition, tax collection also has an impact on tax revenue. This indicates that the higher the level of NPWP ownership and the more effective the tax collection process, the more state tax revenue tends to increase. These findings imply that the government needs to increase tax socialization, expand the taxpayer base, and improve the effectiveness of tax collection to optimize state revenue from the tax sector.*

*Keywords: NPWP; Tax Collection; Tax Receipt; Taxpayer Compliance; Tax Administration.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Barat dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda yang didahului dengan uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selain itu, penagihan pajak juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan NPWP dan semakin efektif proses penagihan pajak, maka penerimaan pajak negara juga cenderung meningkat. Temuan ini memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi perpajakan, memperluas basis wajib pajak, serta meningkatkan efektivitas penagihan pajak untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Kata Kunci: NPWP; Penagihan Pajak; Penerimaan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Administrasi Perpajakan.

### Article info

Received (16/03/2026)

Revised (18/03/2026)

Accepted (19/03/2026)

Corresponding [muwaffiq.nurimansyah@gmail.com](mailto:muwaffiq.nurimansyah@gmail.com)

DOI: 10.47354/mjo.v5i1

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam sistem keuangan negara modern, pajak menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, distribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, serta program-program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan fiskal suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam beberapa dekade terakhir, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi. Penurunan kontribusi sektor migas terhadap penerimaan negara mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan sektor perpajakan sebagai sumber penerimaan utama negara.

Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari keberhasilan sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Indonesia menerapkan sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerimaan pajak negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh negara. Sebagai bagian dari administrasi perpajakan, pemerintah mewajibkan setiap orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan identitas resmi yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Melalui kepemilikan NPWP, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas perpajakan wajib pajak serta memastikan bahwa setiap wajib pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan nasional.

Kepemilikan NPWP memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan. Semakin banyak masyarakat yang memiliki NPWP, maka basis pajak (tax base) akan semakin luas sehingga potensi penerimaan pajak negara juga dapat meningkat. Namun demikian, kepemilikan NPWP tidak selalu menjamin bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh. Dalam praktiknya, masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu atau bahkan memiliki tunggakan pajak yang belum diselesaikan. Permasalahan tunggakan pajak merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menerapkan mekanisme penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh fiskus untuk menagih utang pajak dari wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Penagihan pajak dilakukan melalui beberapa tahapan yang memiliki kekuatan hukum, mulai dari penerbitan surat teguran, surat paksa, penyitaan, hingga tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Melalui mekanisme penagihan pajak, pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan bahwa setiap kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dapat segera dilunasi. Penagihan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum (law enforcement), tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keadilan dalam sistem perpajakan sehingga seluruh wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara proporsional. Meskipun berbagai kebijakan perpajakan telah diterapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar masih belum sebanding dengan jumlah penduduk yang memiliki potensi sebagai wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara optimal. Selain itu, masih ditemukan adanya tunggakan pajak yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya belum sepenuhnya optimal.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP dan pelaksanaan penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajak negara. Namun demikian, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan temuan yang beragam dan belum sepenuhnya memberikan gambaran yang konsisten mengenai efektivitas kedua kebijakan tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pada tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas resmi yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Siti Resmi, NPWP merupakan nomor identitas yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak sebagai alat administrasi yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan. NPWP juga berfungsi sebagai sarana identifikasi wajib pajak dalam setiap aktivitas perpajakan yang dilakukan. Sementara itu, menurut Mardiasmo, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya NPWP, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, menurut Waluyo, kewajiban memiliki NPWP bertujuan untuk memperluas basis pajak (tax base) sehingga potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat meningkat. Melalui sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, NPWP memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas perpajakan wajib pajak secara lebih efektif. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP merupakan bagian penting dari sistem administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai identitas resmi wajib pajak sekaligus sarana bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki NPWP, maka basis pajak akan semakin luas sehingga potensi penerimaan pajak negara dapat meningkat.

### **Penagihan Pajak**

Penagihan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Siti Resmi, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menagih utang pajak dari wajib pajak yang tidak atau belum melunasi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo, penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus untuk menagih pajak yang terutang dengan menggunakan prosedur tertentu, seperti melalui surat teguran, surat paksa, penyitaan, hingga pelelangan. Prosedur ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum perpajakan agar wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Selain itu, menurut Rochmat Soemitro, penagihan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan penerimaan negara dari pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Penagihan pajak memiliki fungsi penting dalam menjaga kepatuhan wajib pajak sekaligus menjamin keadilan dalam sistem perpajakan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan administratif dan hukum yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menagih utang pajak dari wajib pajak. Penagihan pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

### **Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan seluruh penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Menurut Mardiasmo, penerimaan pajak adalah seluruh penerimaan negara yang berasal dari pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo, penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara serta pembangunan nasional.

Selain itu, menurut Siti Resmi, penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari kontribusi wajib masyarakat berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta pembangunan nasional. Tingkat penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak serta efektivitas sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis inferensial. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak secara terukur melalui analisis statistik. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi variabel penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat

sebagai objek penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor tersebut merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi perpajakan, termasuk dalam hal pendaftaran wajib pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui kegiatan observasi serta wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi perpajakan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, laporan perpajakan, arsip instansi terkait, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan analisis statistik untuk menguji hubungan antara variabel penelitian. Tahapan analisis data meliputi beberapa pengujian yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis melalui uji t parsial serta uji F simultan, koefisien determinasi ( $R^2$ )

#### IV. HASIL/TEMUAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat dengan jumlah responden sebanyak 100 orang wajib pajak. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang berisi pernyataan terkait variabel kewajiban kepemilikan NPWP, penagihan pajak, dan penerimaan pajak. Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban pada kategori setuju terhadap pernyataan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak memahami pentingnya kepemilikan NPWP serta pelaksanaan penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa kepemilikan NPWP merupakan bentuk kepatuhan dalam sistem perpajakan dan memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan. Sementara itu, pada variabel penagihan pajak, responden menyatakan bahwa pelaksanaan penagihan pajak melalui surat teguran, penyitaan, maupun tindakan hukum lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun pada variabel penerimaan pajak, responden menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional.

##### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kewajiban	100	2,00	5,00	4,3367	,50861
Penagihan	100	1,60	5,00	3,7220	,73465
Penerimaan	100	1,80	5,00	4,2480	,55423
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer diolah di SPSS, 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi terdapat pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP yaitu sebesar 4,3367, yang menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai kewajiban kepemilikan NPWP. Sedangkan variabel penagihan pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 3,7220, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dinilai cukup baik oleh responden.

##### Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara tepat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP, penagihan pajak, dan penerimaan pajak memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,30, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

##### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

Tabel 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,587	,420		3,782	,000
Kewajiban	,485	,099	,445	4,921	,000
Penagihan	,150	,068	,199	2,199	,030

a. Dependent Variable: penerimaan  
 Sumber: Data Primer diolah di SPSS, 2025

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 1,587 + 0,485X_1 + 0,150X_2$$

Koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan kewajiban kepemilikan NPWP sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,485. Peningkatan penagihan pajak sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,150

**Koefisien Determinasi**

Tabel 3. Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,545 <sup>a</sup>	,297	,283	,46945

a. Predictors: (Constant), penagihan, kewajiban  
 b. Dependent Variable: penerimaan  
 Sumber: Data Primer diolah di SPSS, 2025

Nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,283 menunjukkan bahwa variabel kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak mampu menjelaskan 28,3% variasi penerimaan pajak, sedangkan sisanya 71,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, inflasi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Uji Simultan (Uji F)**

Tabel 4. Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9,033	2	4,516	20,493	,000 <sup>b</sup>
Residual	21,377	97	,220		
Total	30,410	99			

a. Dependent Variable: penerimaan  
 b. Predictors: (Constant), penagihan, kewajiban  
 Sumber: Data Primer diolah di SPSS, 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh F hitung (20,493) > F tabel (3,090), maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

**Uji Parsial (Uji t)**

Tabel 5. Hasil Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,587	,420		3,782	,000
kewajiban	,485	,099	,445	4,921	,000
penagihan	,150	,068	,199	2,199	,030

a. Dependent Variable: penerimaan

Sumber: Data Primer diolah di SPSS, 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Pertama, kewajiban kepemilikan NPWP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Kepemilikan NPWP merupakan langkah awal dalam sistem administrasi perpajakan yang memungkinkan wajib pajak terdaftar secara resmi dalam sistem perpajakan nasional. Dengan adanya NPWP, aktivitas perpajakan wajib pajak dapat dipantau oleh otoritas pajak sehingga dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak negara. Semakin banyak masyarakat yang memiliki NPWP, maka basis pajak akan semakin luas sehingga potensi penerimaan pajak juga akan meningkat. Kedua, penagihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan penagihan pajak melalui tahapan administratif seperti surat teguran, surat paksa, penyitaan, hingga tindakan hukum lainnya terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya.

**V. PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Kepemilikan NPWP merupakan langkah awal dalam sistem administrasi perpajakan karena melalui NPWP wajib pajak dapat terdaftar secara resmi dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak sehingga aktivitas perpajakannya dapat dipantau oleh otoritas pajak. Semakin banyak masyarakat yang memiliki NPWP, maka semakin luas basis pajak yang dimiliki oleh pemerintah sehingga potensi penerimaan pajak juga dapat meningkat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan melalui tahapan administratif seperti surat teguran, penyitaan, maupun tindakan hukum lainnya mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya mekanisme penegakan hukum ini, wajib pajak diharapkan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara simultan, kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara perluasan basis pajak melalui kewajiban kepemilikan NPWP dan penegakan hukum melalui penagihan pajak dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

**VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kewajiban kepemilikan NPWP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Kedua, penagihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Ketiga, kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada perluasan basis pajak melalui kepemilikan NPWP, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan penagihan pajak sebagai bentuk penegakan hukum perpajakan. Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan melalui peningkatan kepemilikan NPWP, sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat, serta optimalisasi pelaksanaan penagihan pajak oleh otoritas perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun peneliti selanjutnya. Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, disarankan untuk terus meningkatkan upaya perluasan kepemilikan NPWP melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Program penyuluhan yang lebih intensif, baik secara langsung maupun melalui media digital, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki NPWP sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Bagi pemerintah atau otoritas perpajakan secara umum, disarankan untuk terus mengembangkan kebijakan yang mendukung peningkatan basis pajak dan efektivitas penagihan, seperti penyederhanaan prosedur pendaftaran NPWP, integrasi data perpajakan, serta

peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi penerimaan pajak, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, atau pemanfaatan teknologi perpajakan (e-tax system), sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak.

#### REFERENSI

- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penerimaan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1–17.
- Jarkoni, W. C. (2025). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 71–85.
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Den Ka, V. S. (2021). Analisis efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 236–245.
- Marani, O., Simanjuntak, A., & Seralurin, Y. C. (2020). Dampak kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak. *Accounting Research Unit Journal*, 1(1), 23–32.
- Meiriasari, V., Ratu, M. K., & Putri, A. U. (2022). Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Ecoment Global*, 7(1).
- Putra, T. G. A. W. P. (2021). Pengaruh penagihan pajak dan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 116–141.
- Ramadhan, F., Firdaus, N. Y., & Wahyuni, E. S. (2021). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Batam Utara. *Menara Ekonomi*, 7(3), 20–34.
- Roulani, G. J., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2020). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 66.
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(1), 105–112.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.